

## Analisis Antara Wanprestasi Dengan Tekanan Target Laba Perusahaan Dalam Perjanjian Jual Beli Handphone Online

Afif Sukandi

*afifleo93@gmail.com*

Hawa Icha Sania Salma

*hawaicha2003@gmail.com*

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : Kampus UTM, Telang, PO. BOX 2 Kamal - Bangkalan, Indonesia.

Korespondensi penulis: *afifleo93@gmail.com*

**Abstract.** *The development of information technology has created a significant shift in consumer behavior, especially in terms of purchasing goods online. Companies running online businesses tend to have profit targets that must be achieved. The pressure to achieve this target can give rise to business practices that may give rise to legal conflicts, including potential breaches in sales and purchase agreements. This research aims to analyze defaults that occur in buying and selling cellphones through online buying and selling. The method used is normative juridical. The research results found that profit target pressure cannot be used as an excuse to violate contractual obligations and consumer protection rights. This case study involves online cellphone buying and selling transactions. This transaction concerns the aspect of default when there is an imbalance between the profit targets agreed upon by both parties. This research aims to analyze the relationship between default and pressure on profit targets set in online cellphone sales and purchase contracts. The results of the research show that there is a significant relationship between default and pressure on profit targets set in online cellphone sales and purchase contracts. These findings can be a basis for entrepreneurs to improve the terms of their online mobile phone sales and purchase contracts and prevent defaults in the future.*

**Keywords:** *Default, Consumer Protection, Online Buying and Selling.*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan pergeseran signifikan dalam perilaku konsumen, terutama dalam hal pembelian barang secara daring atau *online*. Perusahaan dalam menjalankan bisnis *online* cenderung memiliki target laba yang harus dicapai. Tekanan untuk mencapai target ini dapat memunculkan praktik-praktik bisnis yang mungkin menimbulkan konflik hukum, termasuk potensi wanprestasi dalam perjanjian jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wanprestasi yang terjadi dalam jual beli *handphone* melalui jual beli *online*. Metode yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil penelitian menemukan bahwa tekanan target laba tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar kewajiban kontraktual dan hak perlindungan konsumen. Studi kasus ini melibatkan transaksi jual beli *handphone* online. transaksi ini menyangkut aspek wanprestasi ketika terjadi ketidakseimbangan antara target laba yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis antara wanprestasi dengan tekanan target laba yang ditetapkan dalam kontrak jual beli *handphone* online. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara wanprestasi dan tekanan target laba yang

ditetapkan dalam kontrak jual beli handphone online. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi para pengusaha untuk memperbaiki ketentuan kontrak jual beli handphone online mereka dan mencegah wanprestasi di masa depan.

**Kata kunci:** Wanprestasi, Perlindungan Konsumen, Jual Beli *Online*.

## LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan pergeseran signifikan dalam perilaku konsumen, terutama dalam hal pembelian barang secara daring atau *online*.<sup>1</sup> Bisnis jual beli *handphone online* menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat, namun, pada saat yang sama, menghadapi berbagai tantangan hukum yang perlu diatasi. Salah satu isu utama yang muncul adalah wanprestasi, yaitu pelanggaran kontrak yang dapat merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi.<sup>2</sup>

Perusahaan dalam menjalankan bisnis *online* cenderung memiliki target laba yang harus dicapai. Tekanan untuk mencapai target ini dapat memunculkan praktik-praktik bisnis yang mungkin menimbulkan konflik hukum, termasuk potensi wanprestasi dalam perjanjian jual beli. Penelitian ini diinisiasi oleh kebutuhan untuk memahami hubungan antara kasus wanprestasi dalam transaksi jual beli *handphone online* dengan tekanan target laba yang dihadapi oleh perusahaan sebagai pelaku bisnis. Beberapa penelitian sebelumnya juga pernah mengkaji terkait dengan isu wanprestasi yang terjadi dalam belanja *online*, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen<sup>3</sup>, tinjauan yuridis tentang perjanjian jual beli *online*<sup>4</sup>, dan akibat hukum wanprestasi dalam jual beli *online*<sup>5</sup>. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa Undang-Undang yang berkaitan dengan kasus wanprestasi belanja *online* adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pentingnya penelitian ini tidak hanya sebatas pada pemahaman hukum semata, tetapi juga pada dampaknya terhadap keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem bisnis

---

<sup>1</sup> Paramitha, Shabrina, "Efektivitas Pasal 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Dalam Belanja Online", *Skripsi UII*, hal. 1, 2020

<sup>2</sup> Febrihapsari, Ita, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Promosi Potongan Harga Dalam Perjanjian Jual Beli Online", *Skripsi Universitas Jember* hal. 16, 2016

<sup>3</sup> Suhadi, E., & Fadilah, A. A. "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 2021

<sup>4</sup> Hasibuan, S., & Rahmania, N, "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online", *Jurnal Dimensi*, 9(1), 2020

<sup>5</sup> Yaqin, A, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Dinamika*, 25(6), 2019

online. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dalam mengelola risiko hukum, meningkatkan transparansi bisnis, dan mengoptimalkan strategi untuk mencapai target laba tanpa mengorbankan integritas kontrak dan kepercayaan konsumen.

## **KAJIAN TEORITIS**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>6</sup> menjelaskan definisi perjanjian adalah sama dengan kontrak, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 bahwa:

*“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”*

Wanprestasi adalah suatu pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual oleh salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Istilah ini biasanya digunakan dalam konteks hukum perdata atau hukum kontrak.<sup>7</sup> Wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak. Wanprestasi atas transaksi jual beli yang dilakukan dengan penjual. Menurut Subekti dalam bukunya tentang Hukum Perjanjian, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu<sup>8</sup> :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi hukum, tergantung pada ketentuan yang diatur dalam kontrak dan hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Beberapa konsekuensi umum termasuk pembayaran kerugian (*damages*), pemutusan kontrak, atau tuntutan hukum untuk memaksakan pemenuhan kewajiban.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 12

<sup>8</sup> Subekti, R “*Hukum Perjanjian*”, Jakarta: Intermasa, 2010

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang fokus pada analisis dan interpretasi hukum melalui studi terhadap bahan hukum tertulis. Metode ini menitikberatkan pada aspek normatif atau norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya.<sup>9</sup> Metode penelitian yuridis normatif sangat berguna dalam menggali dan mendalami aspek-aspek normatif dalam bidang hukum. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting terutama dalam pengembangan teori hukum, analisis hukum positif, dan memberikan pandangan hukum terhadap permasalahan-permasalahan tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999<sup>10</sup> tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

*“(1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan barang dan atau jasa wajib menyediakan, menjamin, dan atau memberikan hak kepada konsumen atas keamanan, kesehatan, dan keselamatan dalam penggunaan barang dan atau jasa.”*

*“(2) Setiap usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup.”*

Perusahaan dalam bisnis *online* seringkali menghadapi tekanan untuk mencapai target laba yang telah ditetapkan. Tekanan ini dapat mendorong perusahaan untuk mengambil keputusan yang dapat mengorbankan hak dan kepentingan konsumen. Namun, jika perusahaan mengabaikan standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan yang diatur sesuai dalam Pasal 4 tersebut, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi. Misalnya, jika *handphone* yang dijual tidak memenuhi standar keamanan atau menyebabkan risiko kesehatan bagi konsumen. Pembeli seringkali tidak mengetahui apakah penjual menggunakan identitas dan informasi kontak yang asli, barang yang dijual oleh penjual benar-benar ada atau tidak, barang tersebut dalam kondisi yang baik atau tidak, kemudian apakah gambar barang yang di jual di internet atau media sosial

---

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

tersebut sudah sesuai atau tidak dengan barang aslinya, dan jika tidak sesuai tentu saja hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli terutama kerugian materil.<sup>11</sup> Oleh karena itu, sebagaimana pengaturan hukum positif Indonesia, bahwa pelaku usaha yang melakukan wanprestasi wajib bertanggungjawab dengan memberikan sejumlah ganti rugi sesuai yang telah diperjanjikan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, juga disebutkan bahwa konsekuensi hukum wanprestasi dapat melibatkan tuntutan hukum, ganti rugi, atau pemutusan kontrak. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang aman dan memenuhi standar kualitas. Pasal 4 menekankan perlunya perlindungan terhadap konsumen. Perusahaan wajib memastikan bahwa barang yang dijual aman digunakan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Jika tidak, perusahaan dapat dianggap melanggar hak konsumen.

Meskipun terdapat pelanggaran, penyelesaian damai dapat menjadi pilihan untuk menghindari proses hukum yang panjang. Perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kekurangan dan memenuhi hak konsumen. Penting bagi perusahaan untuk tetap mematuhi standar perlindungan konsumen dan tidak mengabaikan kewajibannya demi mencapai target laba. Pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dapat merugikan reputasi perusahaan dan membawa dampak hukum yang serius.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tekanan target laba tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar kewajiban kontraktual dan hak perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen harus diutamakan, dan perusahaan harus memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Penulis menyadari terkait keterbatasan penelitian ini, yaitu berupa sumber literatur yang terbatas dan belum bisa mencakup berbagai aspek. Sehingga, peneliti

---

<sup>11</sup> Khalifatullah Fill Ardhi, *Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hal. 3, 2018

merekomendasikan untuk penelitian yang akan datang dapat mengkaji lebih lanjut terkait hal-hal yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penelitian ini, baik secara moral maupun materiil. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang dilakukan dengan studi literatur. Penulis menyadari keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga sangat diharapkan saran dan masukan untuk tujuan pengembangan penelitian terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhi, K. F. (2018). Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram*.
- Febrihapsari, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Promosi Potongan Harga Dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Skripsi: Universitas Jember*
- Hasibuan, S., & Rahmania, N. (2020). Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal Dimensi, 9(1), 87-98*.
- Paramitha, S. (2020). Efektivitas Pasal 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Dalam Belanja Online. *Skripsi: UII*
- Suhadi, E., & Fadilah, A. A. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian, 2(7), 1967-1978*.
- Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Yaqin, A. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dinamika, 25(6)*.